



BADAN PUSAT STATISTIK



Menuju
Sistem
Statistik
Nasional

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Kabid Statistik Produksi



TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

MDGs
8 Goals, 18 Target,
67 Indikator
(49 tercapai, 18 belum tercapai)



SDGs
17 Goals, 169 Target,
241 Indikator





TPB/SDGs Menyempurnakan MDGs

07. CARA PELAKSANAAN

Tidak hanya memuat *Goals* tetapi juga Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*)

06. ZERO GOALS

MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah”, SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh indicator → “Zero Goals”

05. STAKEHOLDER

Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, OMS & media, filantropi & pelaku usaha, serta pakar & akademisi



01. KOMPREHENSIF

Lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang

02. SUMBER PENDANAAN

Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta

03. HAK ASASI MANUSIA

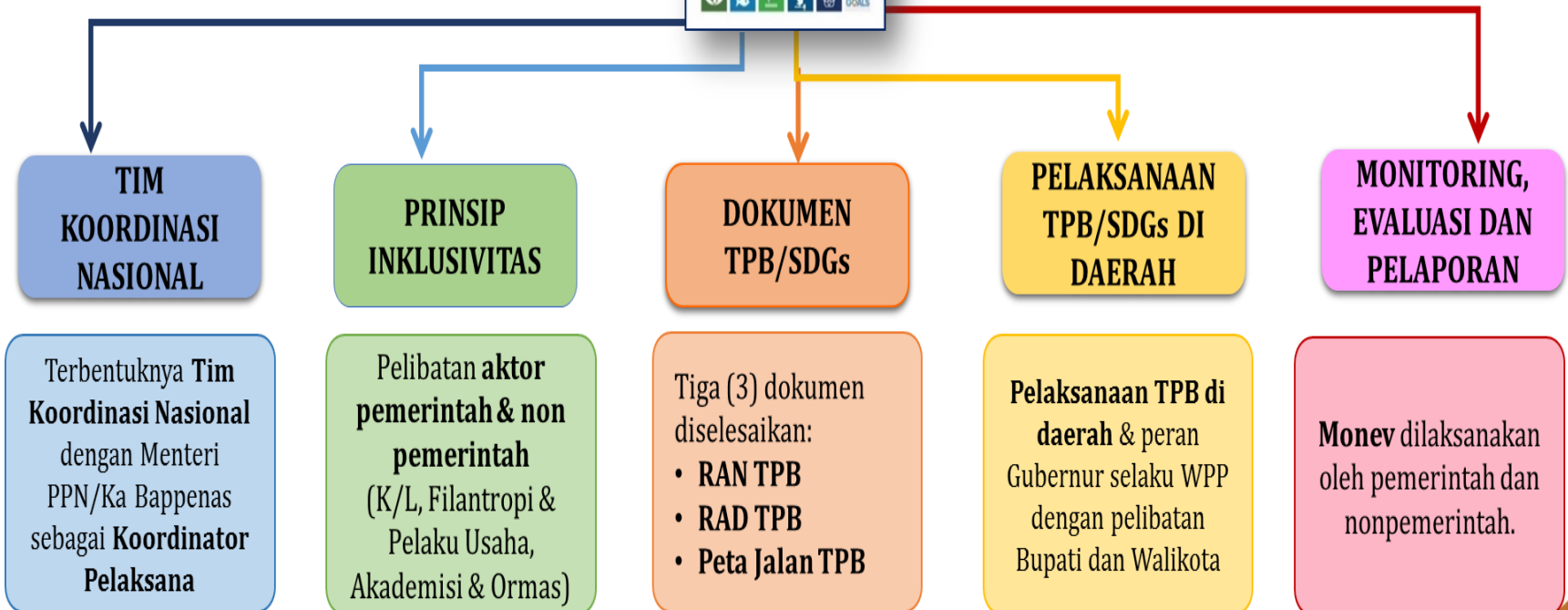
Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya

04. INKLUSIF

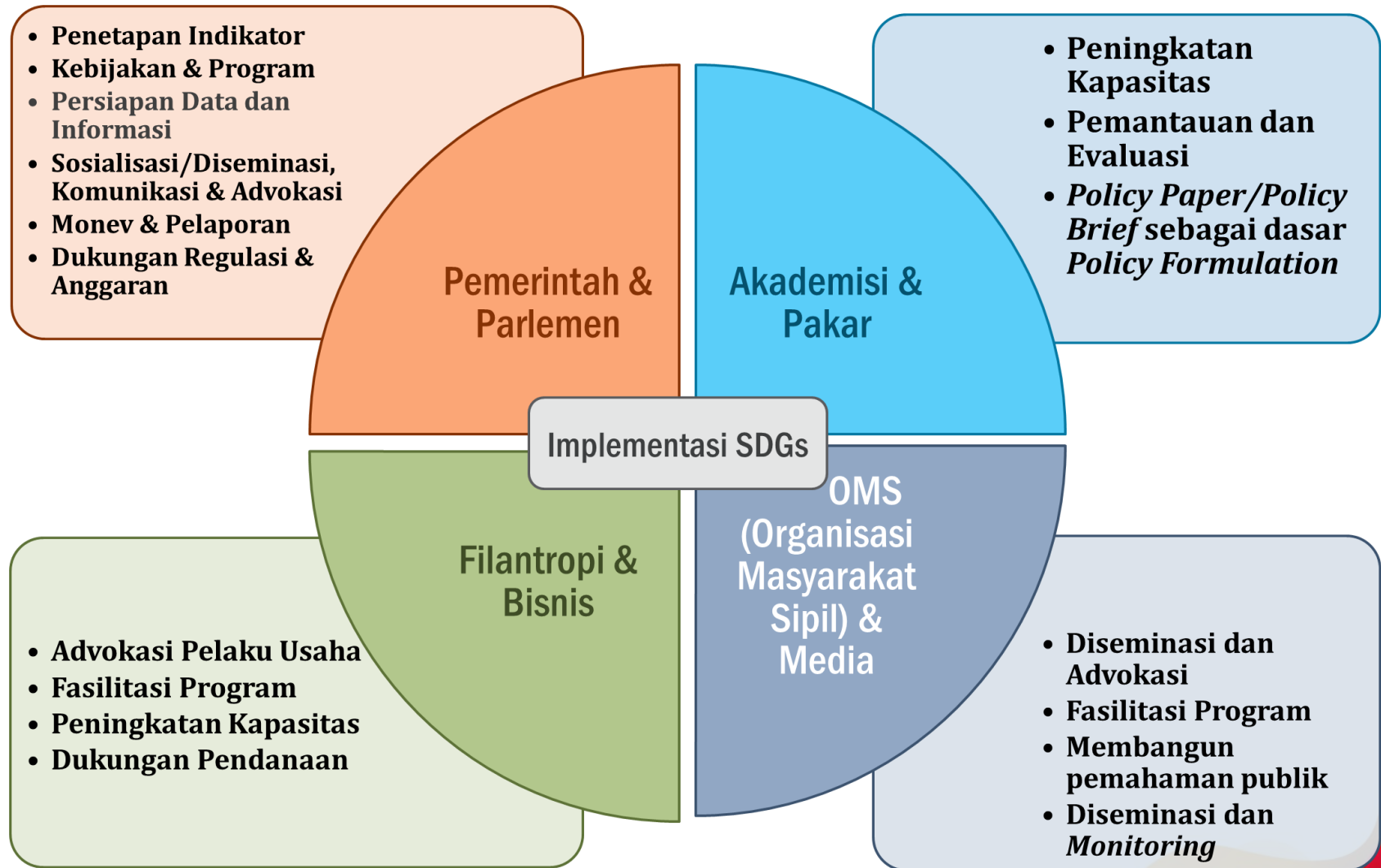
Inklusif, secara spesifik menyasar kepada yang rentan – *no one left behind*

Perkembangan Pelaksanaan TPB/SDGs

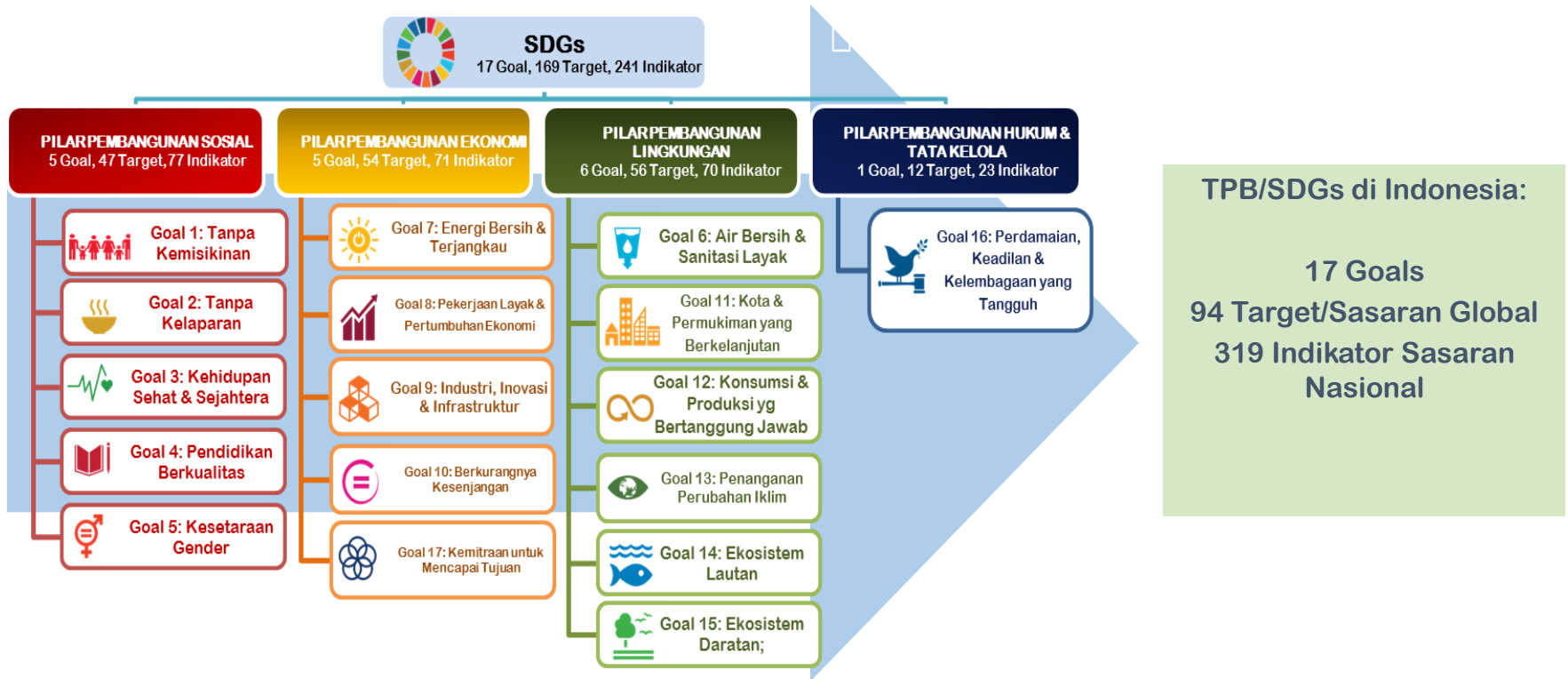
**Amanat Perpres No. 59
Tahun 2017**



Peran Pemangku Kepentingan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB

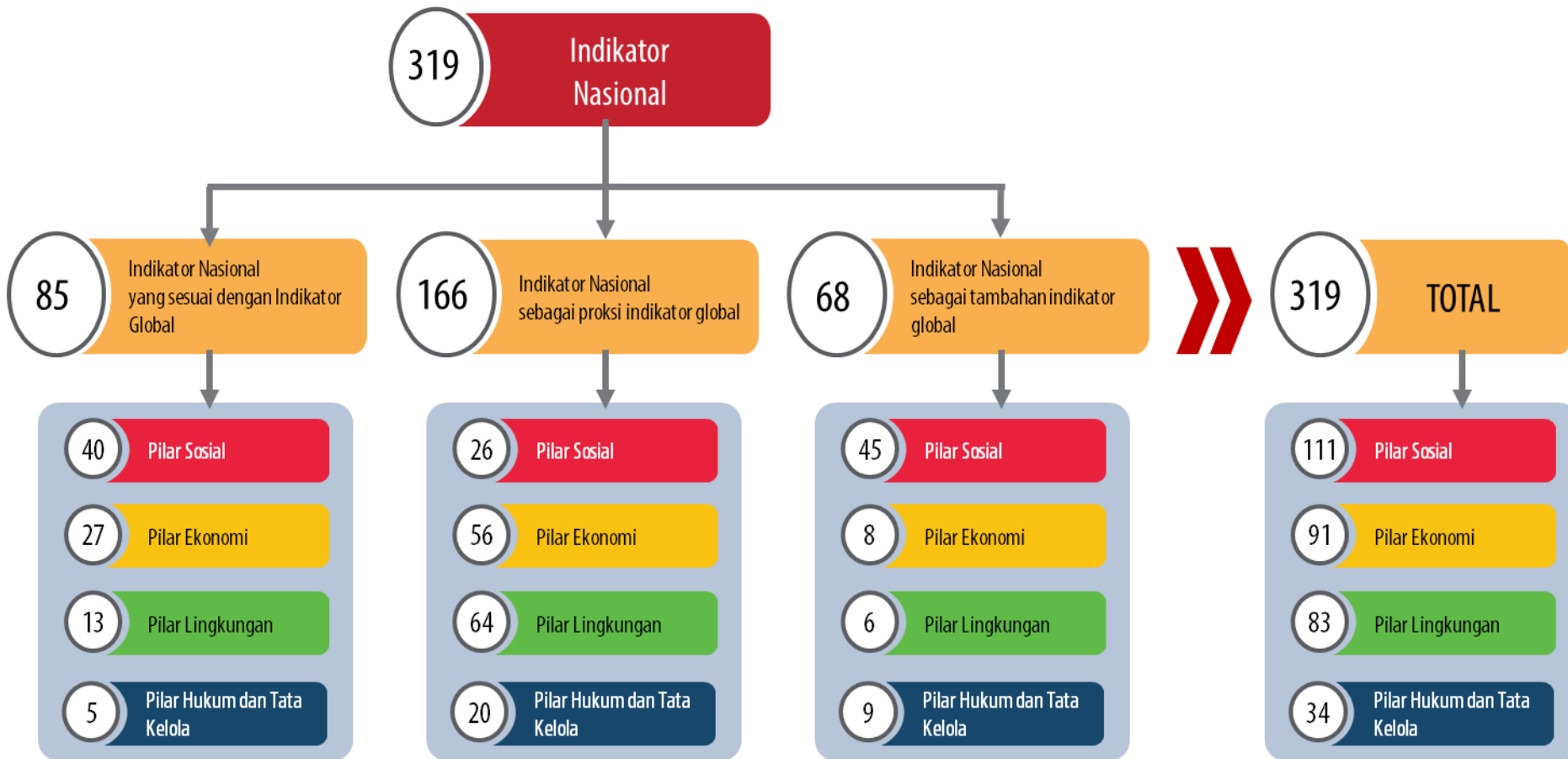


Perpres 59/2017:
Pelaksanaan
Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia adalah pembangunan yang menjaga:

- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat
- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
- kualitas lingkungan hidup
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

Pemetaan Tujuan, Target, dan INDIKATOR NASIONAL



Integrasi SDGs dalam Perencanaan Daerah



- SDGs harus dituangkan kedalam **program dan kegiatan konkrit** yang dimuat dalam dokumen perencanaan daerah.
- Penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan **kondisi, potensi dan permasalahan daerah, dan memperhatikan aspek lingkungan hidup.**



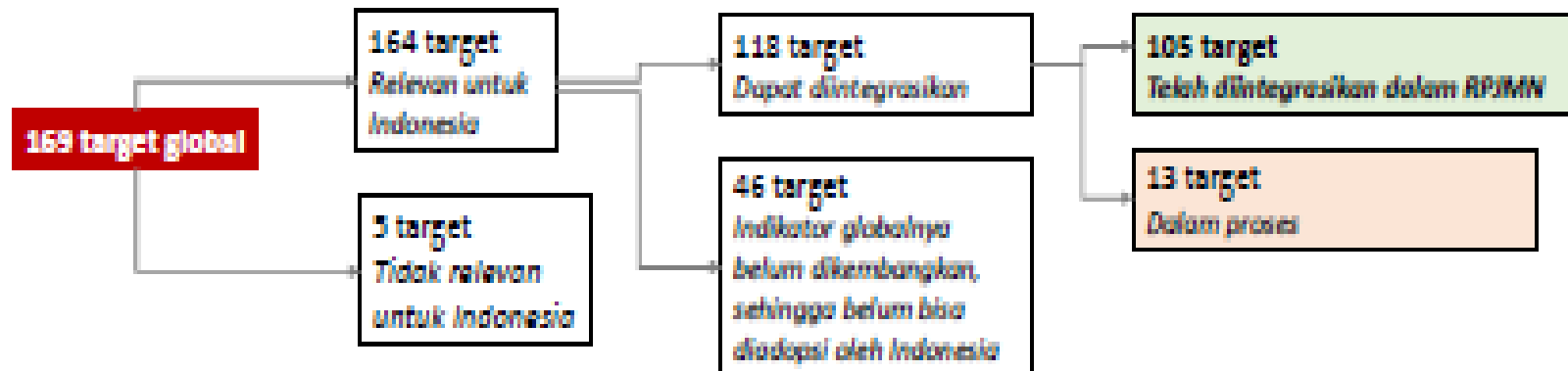
Peran Pemda sebagai Pelaksana adalah:

1. Mencapai (program), Tujuan Indikator (Kegiatan) SDGs;
2. Mengoptimalkan potensi fisik dan non fisik di wilayahnya;
3. Menginternalisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan yang mendukung SDGs pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dokumen
Perencanaan
Daerah

Integrasi TPB/SDGs dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024



Sumber: Dikutip dari paparan Workshop
ToT Money RAD 3 Sep 2109

Pengarusutamaan *SDGs*

Roadmap TPB/SDGs

Dokumen rencana kebijakan strategis tahapan pencapaian TPB/SDGs 2016-2030 sesuai sasaran pembangunan nasional

01

Perpres 59/2017 meminta daerah menyusun RAD TPB/SDGs **12 bulan setelah Perpres berlaku → 10 Juli 2018**

02

Rencana Aksi Nasional

Dokumen rencana kerja tingkat nasional untuk mencapai TPB/SDGs sesuai dengan sasaran nasional

03

Rencana Aksi Daerah

Dokumen rencana kerja tingkat daerah untuk mencapai TPB/SDGs sesuai dengan sasaran daerah

Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya.

Pentingnya Ketersediaan Data



Ketersediaan
data

- Pengembangan database
- Disagregasi data by sex, urban-rural, regional (provincial and district), disable-non disable, poor and non-poor



1. Sebagai acuan penyusunan Peta Jalan, RAN, RAD TPB/SDGs, dibutuhkan persepsi yang sama tentang Tujuan, Target & Indikator TPB/ SDGs.



2. Data SDGs digunakan utk mengukur ketercapaian tiap tujuan dan target TPB/ SDGs



3. Sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta keterbandingan pencapaian TPB/ SDGs antar-negara dan antar-daerah di Indonesia.

97 indikator SDGs

Tersedia dari hasil Sensus dan Survei yang dilakukan oleh BPS



Sebagian besar data tersebut untuk level nasional dan provinsi, datanya dapat didisagregasi

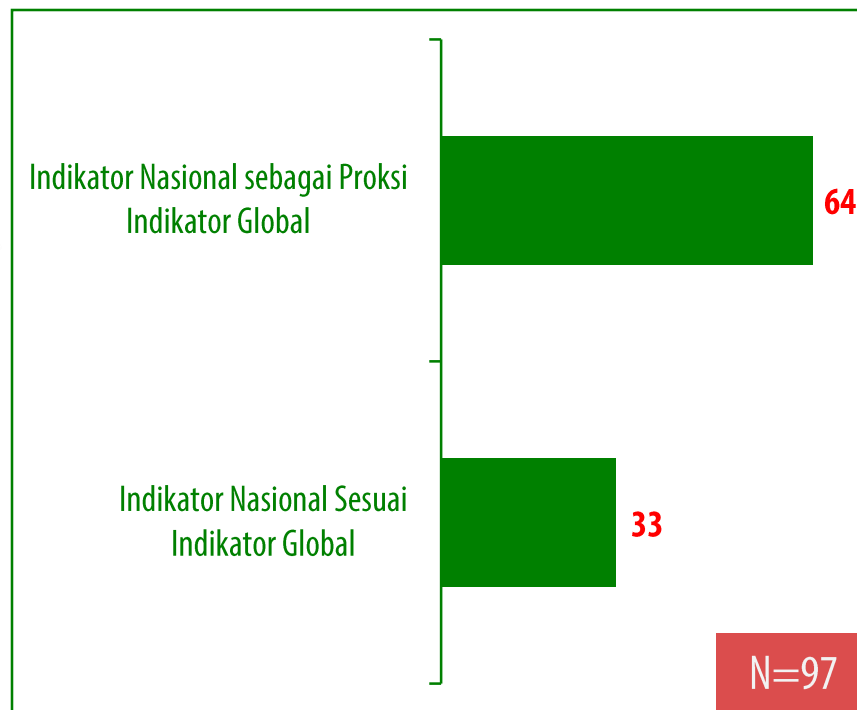
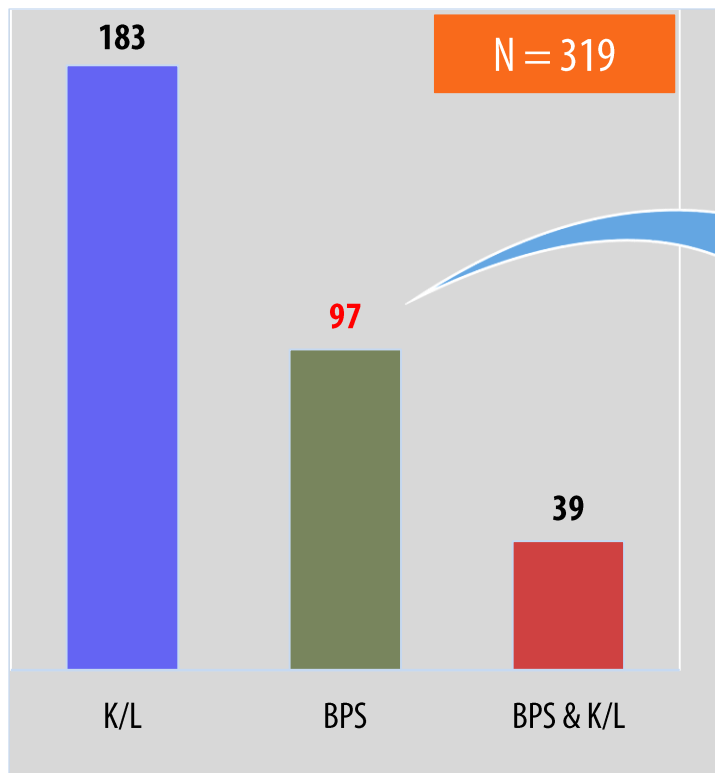
- jenis kelamin,
- urban dan rural,
- miskin dan tidak miskin,
- disable dan non disable

- Jenis kelamin,
- urban dan rural,
- disable dan non disable

Keterbatasan sampel pada survei BPS

maka data SDGs level kab/kota menjadi **terbatas**, bahkan data yg ada juga **tidak dapat dilakukan disagregasi data**

Ketersediaan Data TPB/SDGs Indonesia Menurut Sumber Data



Secara total BPS akan berkontribusi terhadap
136 indikator TPB Indonesia

Catatan:

*) Sejak tahun 2018 Indonesia berhasil menghitung tambahan indikator global, yaitu: *Prevalensi of Undernourishment (PoU)* dan *Food Insecurity Experience Scale (FIES)*.

Pemetaan Indikator

Menurut Level Wilayah Penyajian

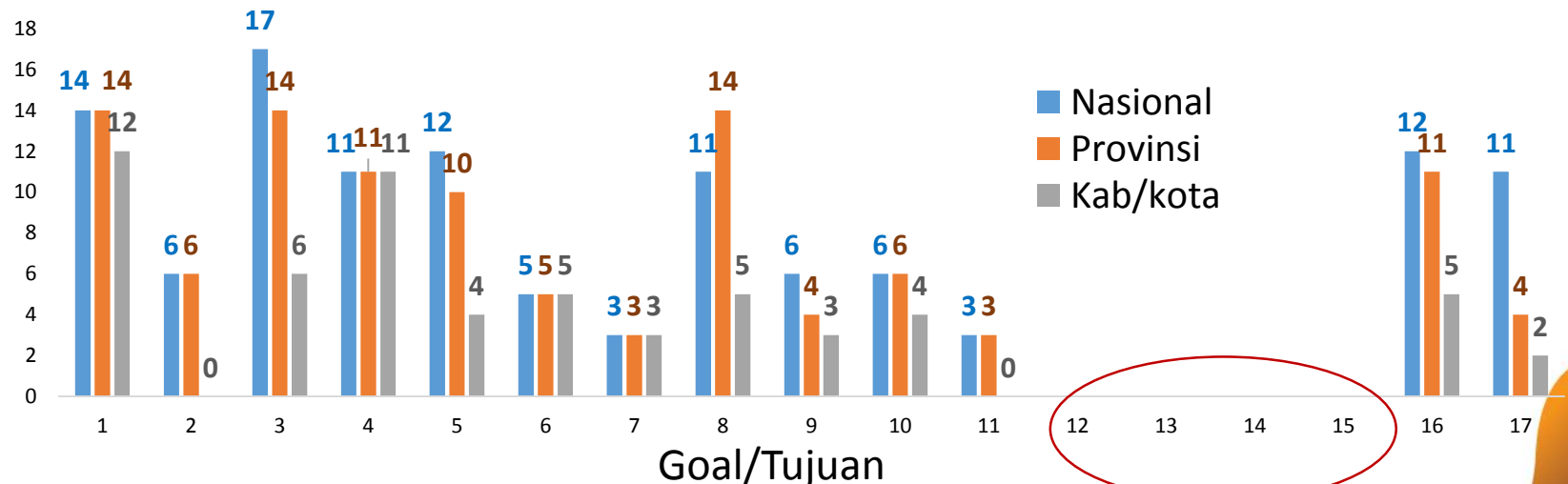
Jumlah indikator yang diharapkan tersedia di BPS menurut level wilayah penyajian di tahun 2018 (sesuai metadata)



Catatan:

- 83 dari 117 indikator level nasional telah tersedia datanya
- 67 dari 105 indikator level provinsi telah tersedia datanya

Jumlah Indikator TPB yang Diharapkan Tersedia Dari Sumber BPS Menurut Goal/Tujuan dan Level Wilayah Penyajian



Sumber: Dokumen Metadata Indikator TPB (Sekretariat TPB Nasional/Bappenas)

BPS tidak dapat menyediakan

Upaya Lain



Kerja sama dengan K/L lain

BPS bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga telah dapat menghasilkan **39 indikator SDGs**



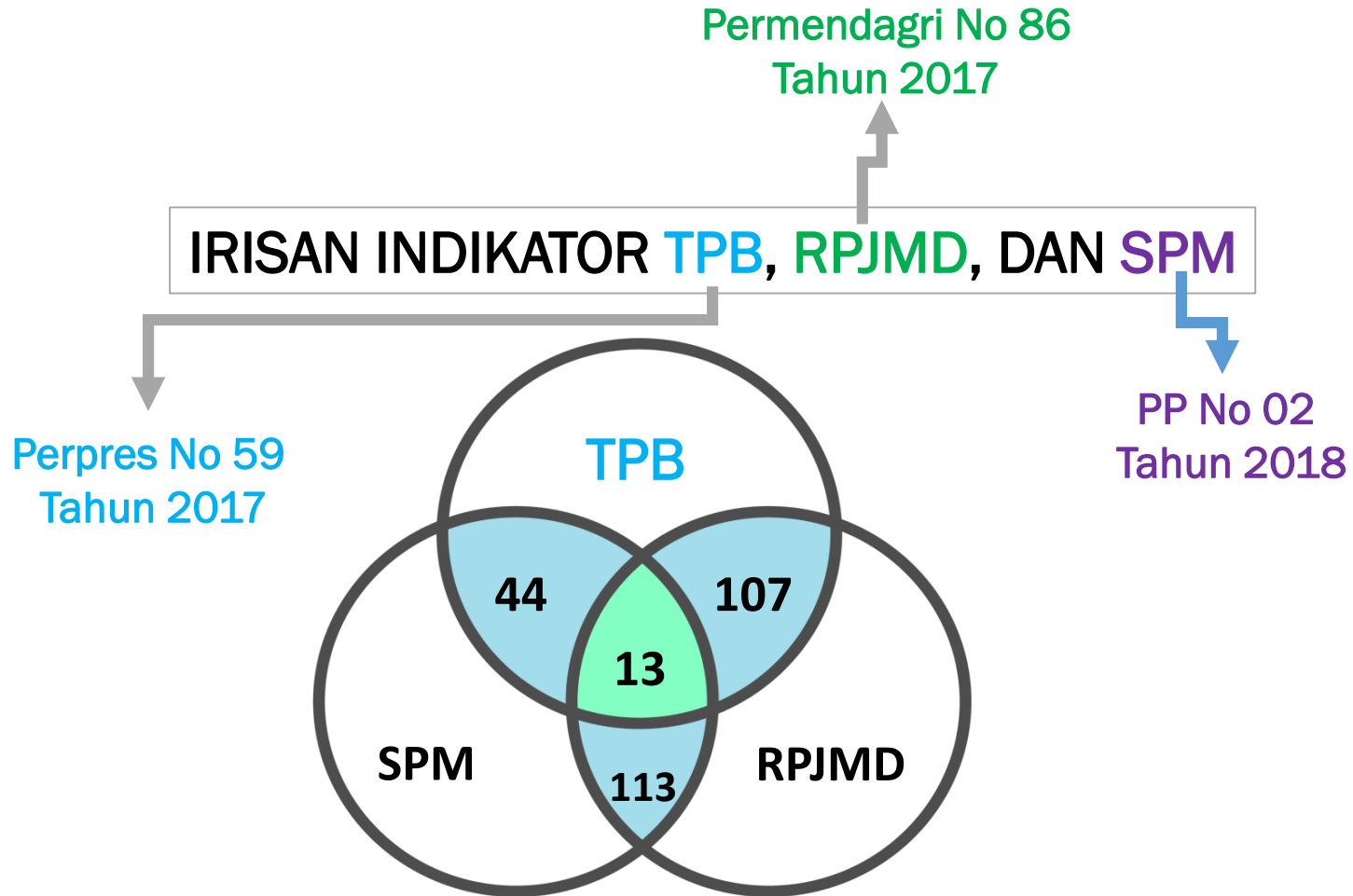
Pembinaan Data Sektoral

Melalui Perpres Satu Data Indonesia, BPS melakukan pembinaan data sektoral. Saat ini, ada **183 indikator SDGs** yang merupakan data sektoral dan menjadi tanggung jawab K/L yang bersangkutan yang perlu pembinaan



Data SDGs yang Berstandar Global

BPS dengan disupport oleh **UN (Unicef, UNFPA, UNDP, FAO dan UN yang lain)** mengusahakan agar data SDGs yang ada berstandar global, saat ini telah ada **33 indikator SDGs** yang dihasilkan oleh BPS berstandar global



Irisan antara indikator TPB x RPJMD : 107 indikator
Irisan antara indikator TPB x SPM : 44 indikator
Irisan Antara Indikator SPM x RPJMD : 113 Indikator
Irisan antara indikator TPB x RPJMD x SPM : 13 indikator

Metadata Indikator TPB/SDGs



Metadata TPB/SDGs Indonesia melingkupi:

1. Tujuan;
2. Target;
3. Indikator;
4. Konsep dan definisi;
5. Metode Perhitungan;
6. Manfaat;
7. Sumber dan Cara Pengumpulan Data;
8. Disagregasi;
9. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data.

Summary Metadata TPB/SDGs

Target	Kode Indikator	Nama Indikator	Keterangan
TARGET	INDIKATOR		KETERANGAN
16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.	16.8.1	Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negara-negara berkembang di Organisasi Internasional.	Indikator global yang akan dikembangkan.
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).
	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Indikator nasional sebagai tambahan indikator global (tidak ada di dalam lampiran perpres).
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.1	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.	Indikator global yang memiliki proksi dan akan dikembangkan.
	16.10.1.(a)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

- **Dengan tanda * :**
Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global
- **Tanpa tanda * :**
Indikator global yang akan dikembangkan
- **Huruf dengan tanda kurung (a), (b), dst.**
 - Indikator nasional sebagai proksi indikator global;
 - Indikator nasional sebagai tambahan indikator global

TARGET 1.4

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

INDIKATOR

1.4.1.(a)

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan, dinyatakan dengan persentase. Fasilitas kesehatan seperti; Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polindes. Perhitungan indikator ini difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA

BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

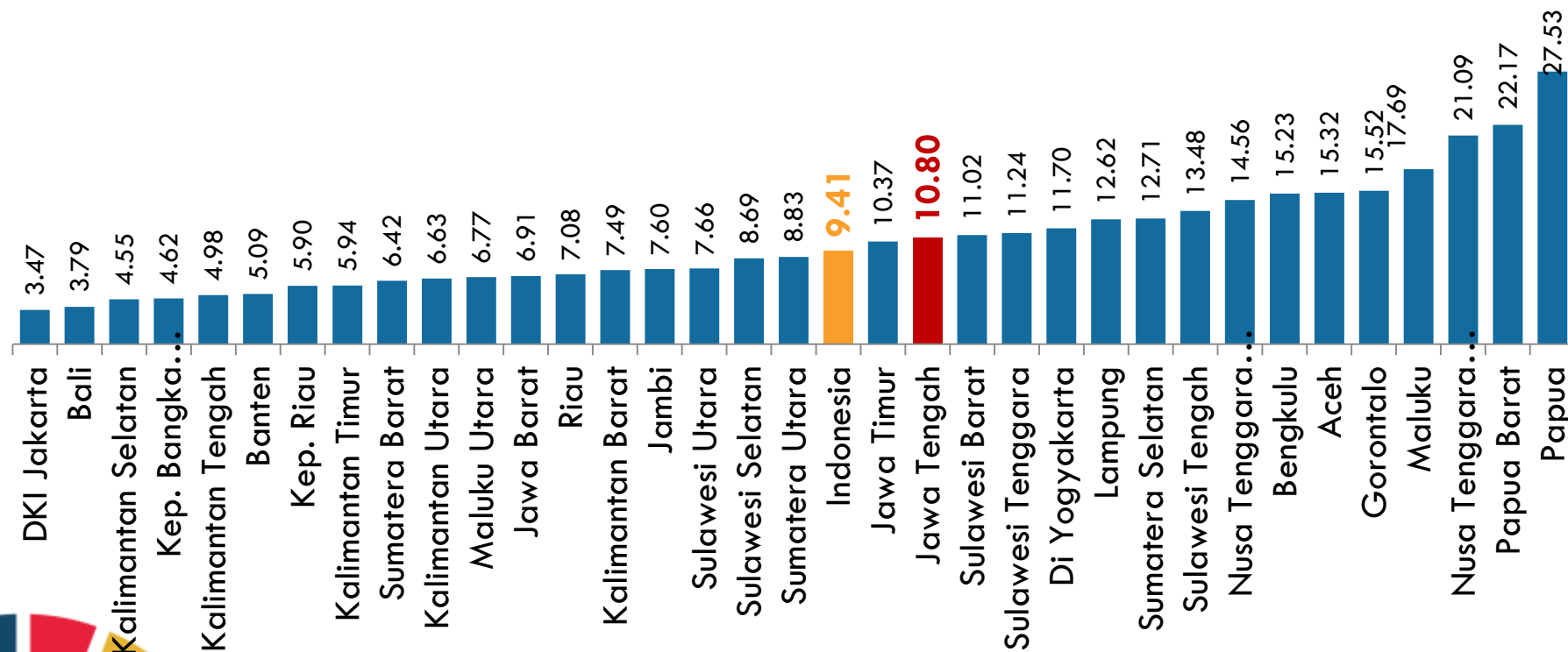
1. Wilayah administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan perdesaan
3. Kelompok pendapatan (pengeluaran)

CONTOH
METADATA
INDIKATOR
TPB/SDGs

Persentase **Penduduk** Yang Hidup **di Bawah Garis Kemiskinan** Menurut Provinsi, Maret 2019



Indikator 1.2.1*

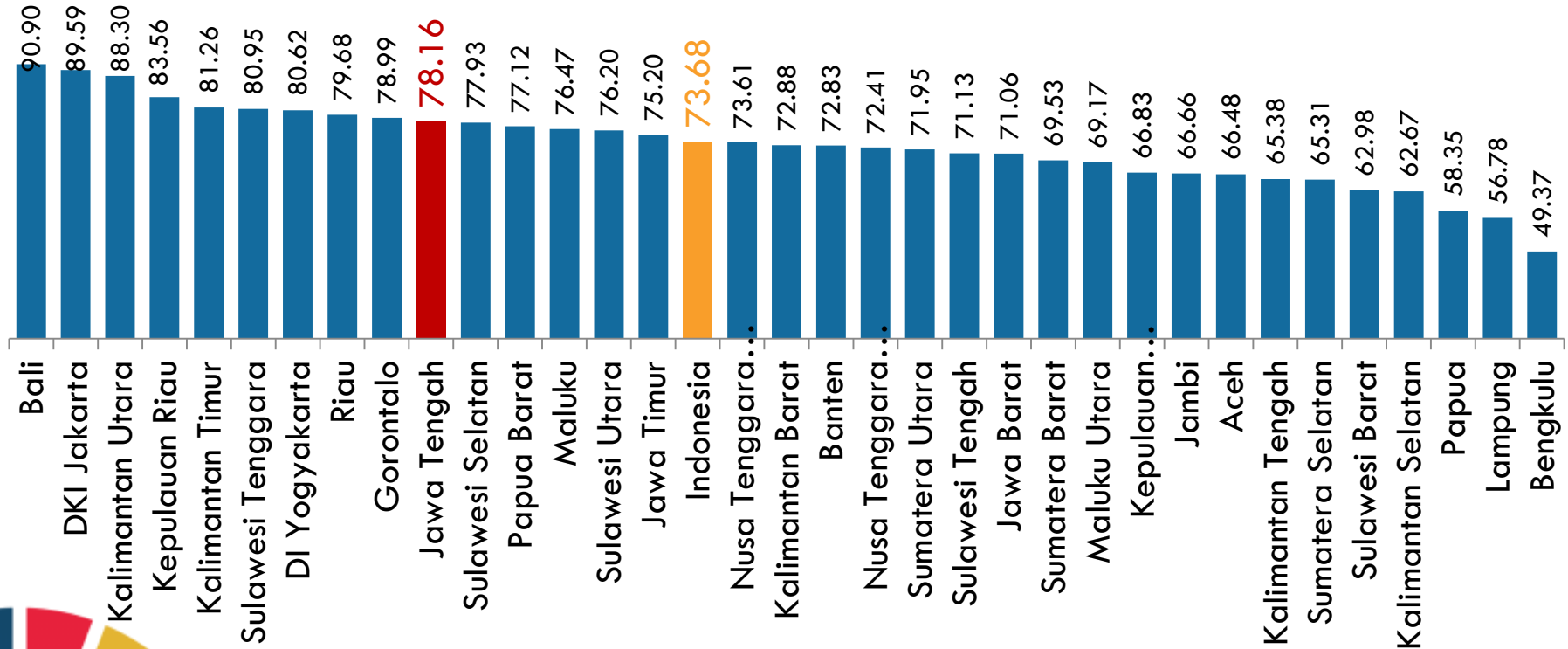


Disparitas tingkat kemiskinan antar provinsi sangat tinggi
(DKI Jakarta = 3,47%, Papua = 27,53%, Indonesia = 9,41%)
Jateng di peringkat 19

Persentase **rumah tangga** yang memiliki akses terhadap **layanan sumber air minum layak** dan berkelanjutan (%), 2018



Indikator 1.4.1 (d)

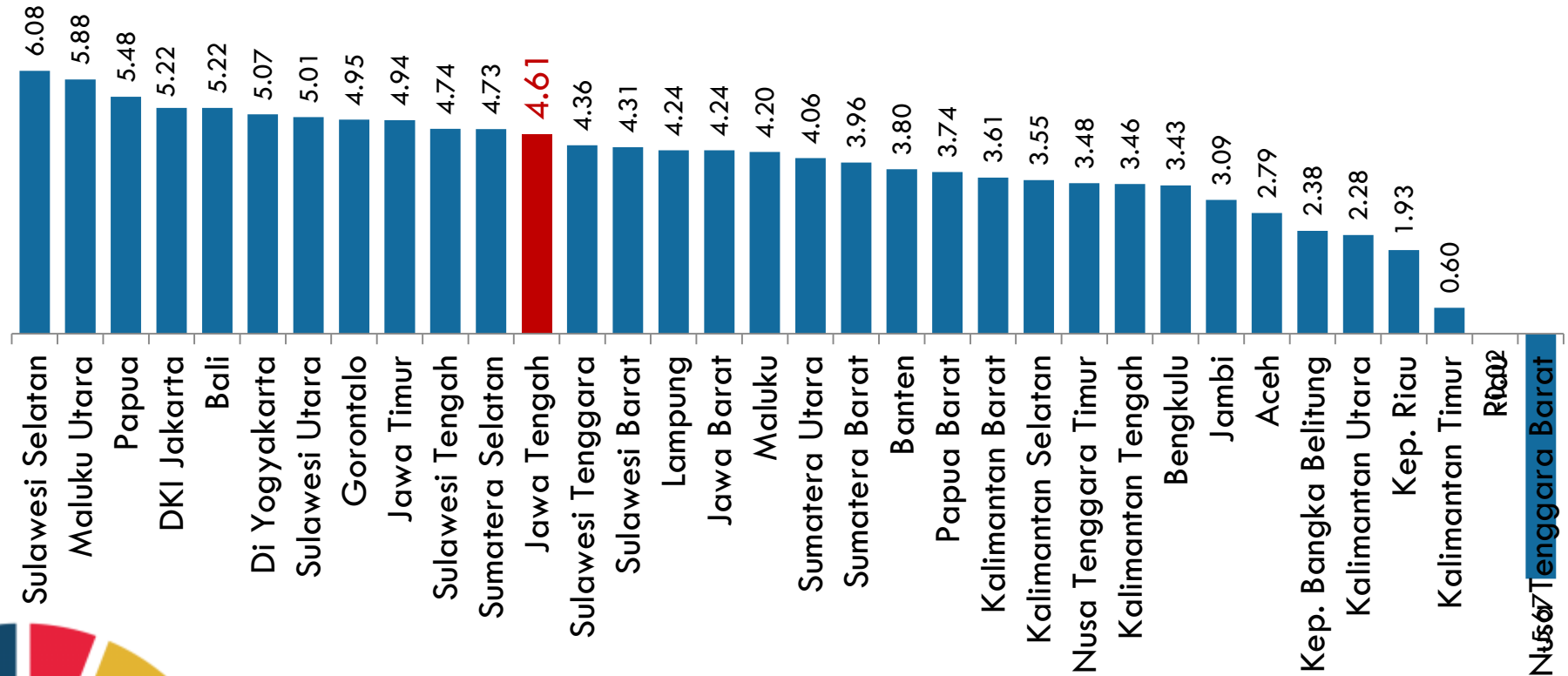


Disparitas antar provinsi cukup tinggi
(Bali = 90,90%, Bengkulu = 49,37%, Indonesia = 73,68%)
Jateng di peringkat 10

Laju pertumbuhan PDRB per kapita (%), 2018



Indikator 8.1.1*



Disparitas pertumbuhan PDRB per kapita antar provinsi sangat tinggi
(Sulteng = 6,08%, Kaltim = -5,67%)
Jateng di peringkat 12

Aplikasi SDGs Kab Pati





← Google Play



SDGs Kab Pati

amijaya.co

Pendidikan

UNINSTAL

BUKA

Apa yang baru ●

Terakhir diupdate 12 Apr 2019

OK

[SELENGKAPNYA](#)

Beri nilai aplikasi ini

Sampaikan pendapat Anda



[TULIS ULASAN](#)

Kontak developer



Situs





Tentang aplikasi ini

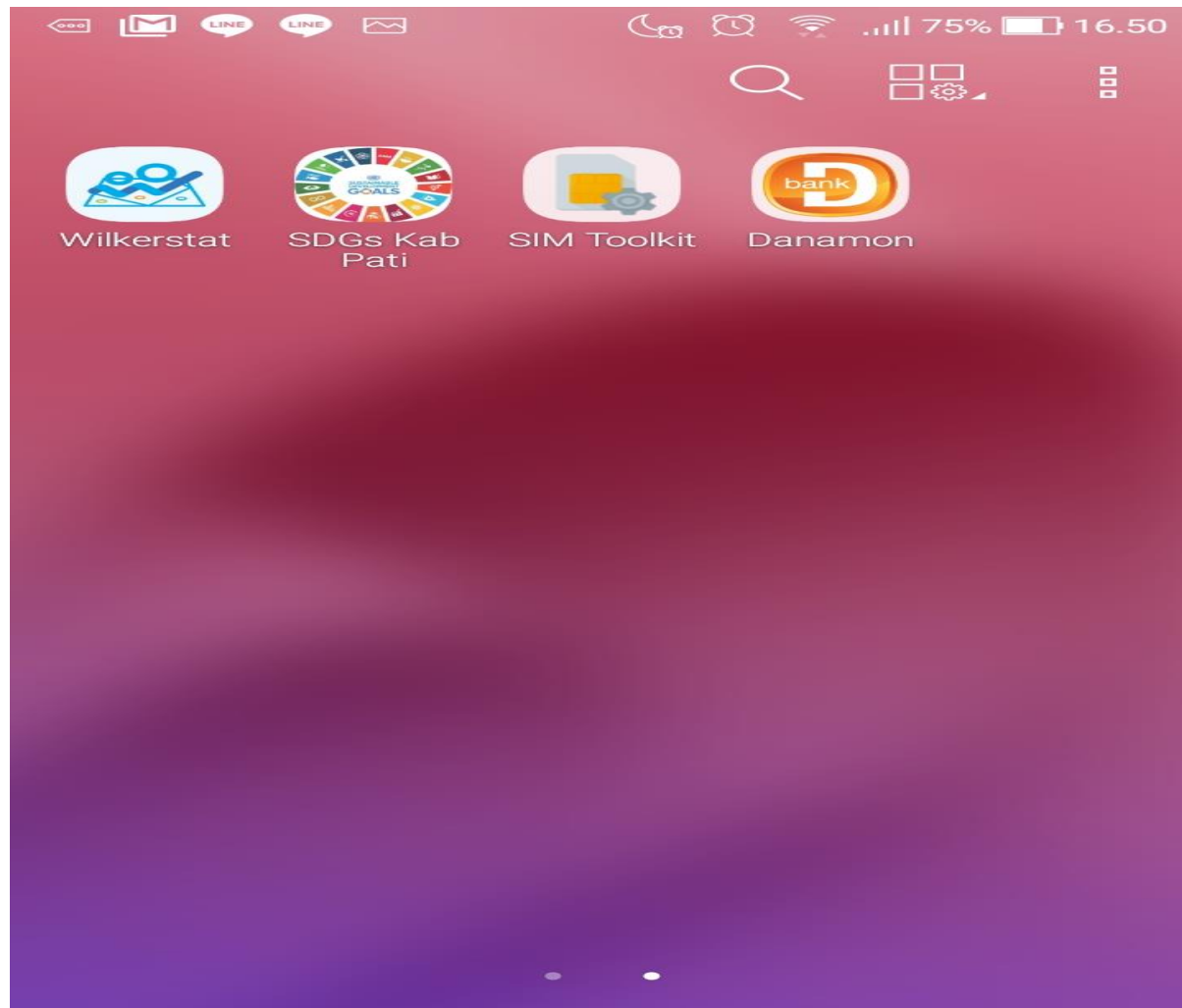
SDGs Kab Pati menyajikan data indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

SDGs Kab. Pati

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS Kabupaten Pati bersama Pemerintah Kabupaten Pati melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan statistik dasar dan statistik sektoral.

SDGs Kabupaten Pati menyajikan data-data indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tersedia di Kabupaten Pati dengan sumber data dari BPS Kabupaten Pati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pati. Data disajikan dalam bentuk tabel (target dan realisasi) dan grafik (realisasi). Selain itu, disajikan pula metadata indikator SDGs untuk





SDGs Kab Pati

Apa itu SDGs (Sustainable Development Goals) / TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) ?

Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hirup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang yang terlewatkan atau "No-one Left Behind". SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Divisi Statistik UN-





Menu Target SDGs



Menu Indikator SDGs



SDGs Kab Pati

1 NO POVERTY

Goals 1 No Poverty / Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
1.2

Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

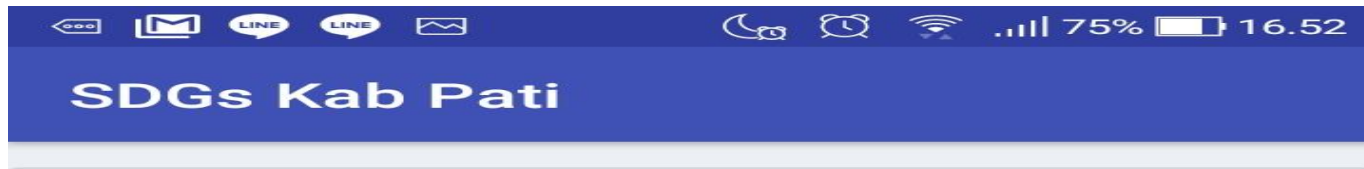
1.2.1*
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Indikator Kabupaten Pati : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan

Sumber data :

- Target : RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022
- Realisasi : BPS Kabupaten Pati

Menu Data Target dan Realisasi Indikator SDGs (Tabel)



Data

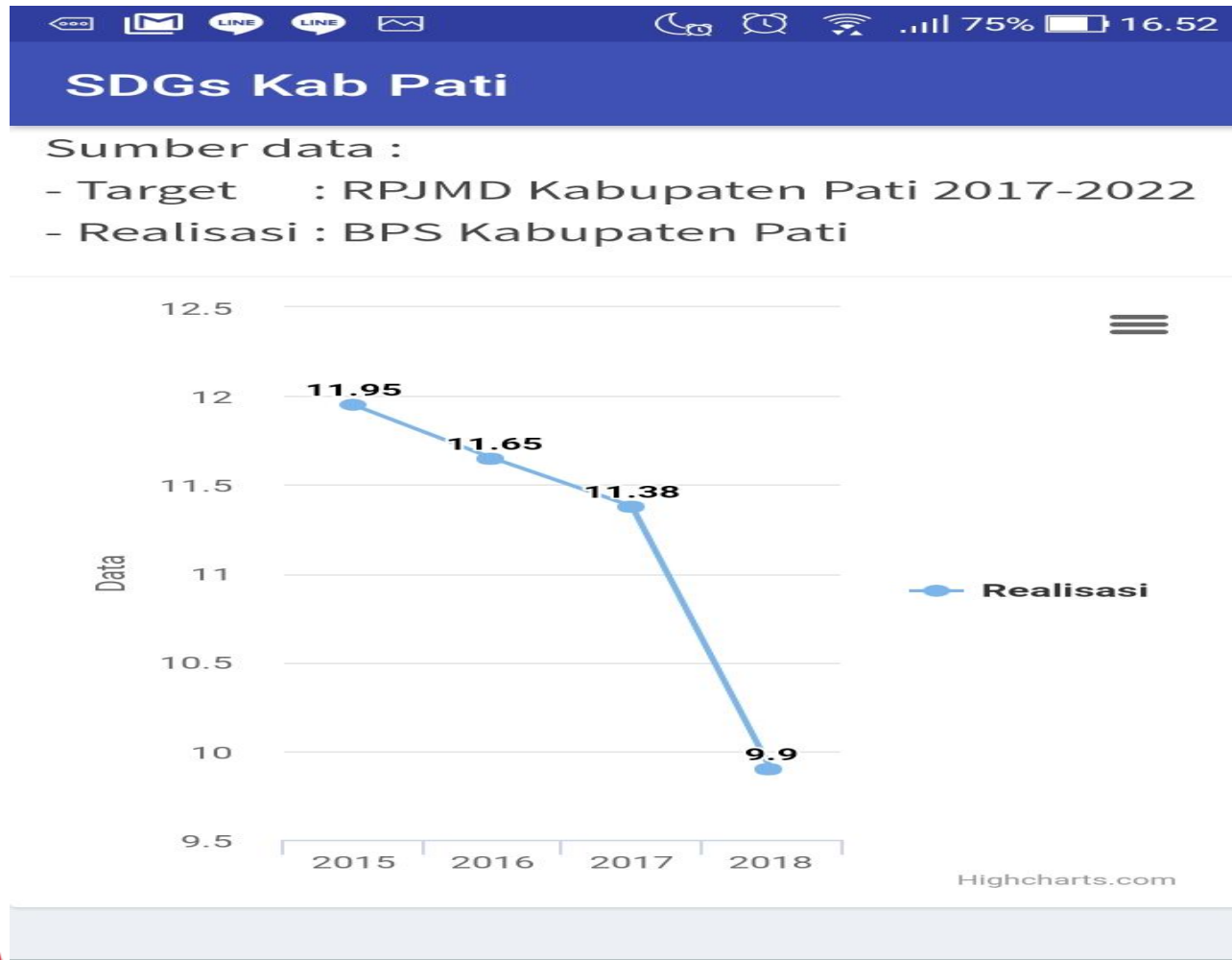
#	Tahun	Target	Realisasi	Satuan
1.	2015	6.31	11.95	persen
2.	2016	5.51	11.65	persen
3.	2017	11.29	11.38	persen
4.	2018	10.53	9.9	persen

Meta Data

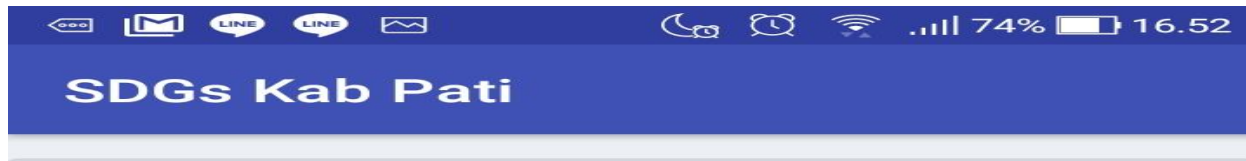
Grafik



Menu Data Realisasi Indikator SDGs (Grafik)



Menu Meta Data Indikator SDGs (1)



Meta Data

Indikator nasional yang sesuai dengan indikator global (ada di dalam lampiran perpres).

KONSEP DAN DEFINISI

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

Garis kemiskinan merupakan representase dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

METODE PERHITUNGAN

Cara Perhitungan:

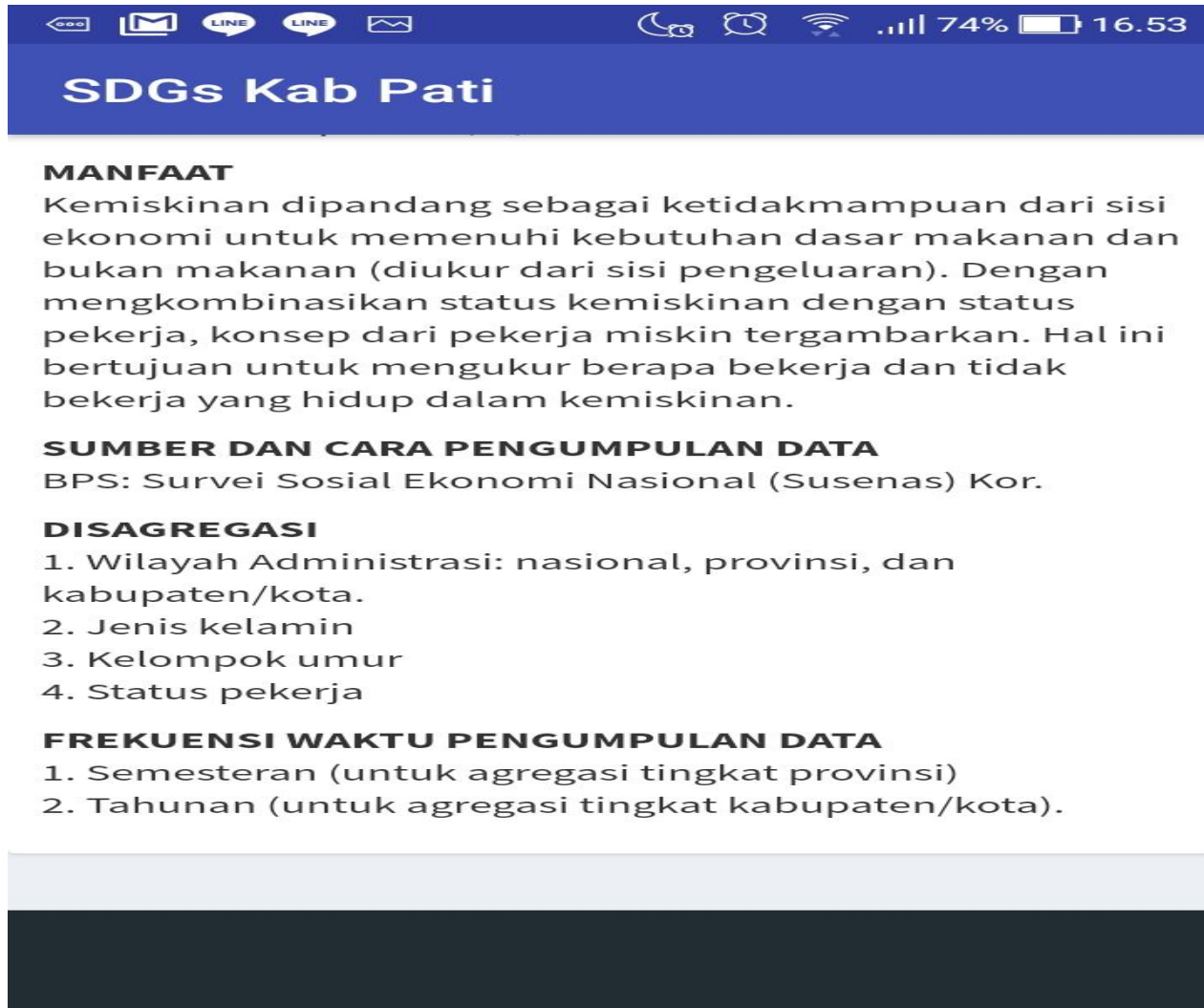
Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).

MANFAAT

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan



Menu Meta Data Indikator SDGs (2)



SDGs Kab Pati

MANFAAT
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja, konsep dari pekerja miskin tergambarkan. Hal ini bertujuan untuk mengukur berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kemiskinan.

SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor.

DISAGREGASI

1. Wilayah Administrasi: nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
2. Jenis kelamin
3. Kelompok umur
4. Status pekerja

FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA

1. Semesteran (untuk agregasi tingkat provinsi)
2. Tahunan (untuk agregasi tingkat kabupaten/kota).



TERIMA KASIH